

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan memang menjadi potret di belahan dunia manapun. Hampir di setiap Negara, tidak terlepas dari permasalahan yang satu ini. Salah satunya yaitu Negara Indonesia. Sebagai salah satu Negara berkembang, polemik kemiskinan tentunya sudah tidak asing lagi. Keterbelakangan dan kemiskinan umumnya melanda masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi karena cenderung masyarakat pedesaan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sumber daya modal yang terbatas, lapangan kerja yang terbatas, dan keterbatasan sarana infrastruktur pedesaan sehingga dapat menghambat kegiatan perekonomian di pedesaan.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa (Kurniawan, 2016).

Menurut Sinarwati (2019) menyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu berperan besar dalam pembangunan desa melalui pengelolaan potensi desa yang optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa mematikan usaha yang sudah ada di desa yang telah dibentuk sebelumnya. Sedangkan, menurut pendapat Sukarini (2018) yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu menurut Nugroho, (2020) menyatakan bahwa dalam pembentukan BUMDes diharapkan dapat mendorong pembangunan di tingkat Desa dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat Desa. Berdasarkan (Permendes PDPTT RI No. 4 Tahun 2015 “Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes,” n.d.) “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Menurut Nugroho, dkk. dalam (Agunggunanto & Darwanto, 2016) tujuan

adanya BUMDes adalah dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pengembangan ekonomi lokal desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dengan tujuan akhir meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Perkembangan perekonomian di tingkat desa juga diharapkan agar mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan pada kawasan perkotaan, serta mengurangi angka urbanisasi sehingga terjadi pemerataan ekonomi antara desa dan kota.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, semakin berkembang sejak dibentuk tahun 2014, seperti BUMDes Tajun dan BUMDes Tunjung di Kecamatan Kubu tambahan yang memiliki omzet terbesar di daerah pesisir utara Pulau Bali. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Gede Sandiyasa mengatakan bahwa Bumdes Tajun memiliki omzet Rp12 miliar dan Bumdes Tunjung Rp6 miliar. Pengelolaan unit usaha itu mampu menggeliatkan perekonomian sekaligus berpengaruh terhadap menurunnya kemiskinan di desa tersebut. Di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014 sudah terbentuk 108 BUMDes dari 129 desa yang ada di daerah itu. BUMDes dibentuk untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah. Unit usaha BUMDes di desa-desa itu berbagai jenis, kebanyakan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Selain itu banyak BUMDes mengembangkan usaha pertokoan, pengelolaan air bersih, pasar tradisional, hingga usaha peternakan. Hingga kini pengelolaan unit usaha itu tergolong baik dan berjalan lancar tanpa masalah (Antara, 2018). Hal ini didukung

dengan adanya laporan keuangan yang di buat dengan baik dan benar. Laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara umum laporan keuangan BUMDes tidak berbeda jauh dengan laporan keuangan lembaga lain pada umumnya. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes secara keseluruhan selama satu periode. Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan modal. Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dipahami dan dapat digunakan oleh pemakai. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas laporan keuangan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan mempunyai manfaat terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Sukarini (2018). Selain kualitas laporan keuangan ada beberapa faktor penting yang mendukung diantaranya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kualitas sumber daya manusia, Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan

sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Putri dalam Novia, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Astrini, 2017) mendapatkan hasil yang mana sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dalam kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia sangat di perlukan dalam laporan keuangan hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin berkualitas laporan keuangan yang akan didapatkan. Di dalam penyusunan laporan keuangan sumber daya manusia sangat di perlukan karena hasil laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Dalam sumber daya manusia tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendukung terhadap kualitas laporan keuangan, jika tingkat pendidikan semakin tinggi dan pengetahuan semakin luas maka berpeluang besar dalam semakin baik atau berkualitasnya laporan keuangan. Penelitian ini menolak hasil penelitian Setia (2018) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.

Selain kualitas sumber daya manusia pengawasan keuangan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengawasan keuangan merupakan suatu sistem yang di rancang untuk menilai standar kinerja pada perencanaan yang menjadi umpan balik informasi dalam membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tentukan apakah mengalami penyimpangan dan diperlukan perbaikan dalam menjamin sumber daya perusahaan telah digunakan secara baik, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Roza, 2017). Penelitian yang dilakukan (Akhmad, 2018) mendapatkan hasil yang mana

pengawasan keuangan berpengaruh atau signifikan positif dalam laporan keuangan, semakin baik pengawasan keuangan yang dilakukan maka kualitas laporannya juga akan semakin baik dan berkualitas. Banyak kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan karena tidak adanya pengawasan yang baik dan memadai, hal ini memberikan peluang yang besar untuk pegawai atau karyawan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan kurang baik atau tidak berkualitas. Maka dari itu pengawasan keuangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan hal terburuk terjadi. Penelitian ini menolak penelitian Dita (2011) menyatakan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu sistem informasi akuntansi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi masyarakat (Pardani dalam Jagiyanto, 2017). Penelitian yang dilakukan (Tawaqal, 2017) mendapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini harus disesuaikan dengan input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik agar mendapatkan laporan keuangan yang baik. Sistem informasi akuntansi diperlukan dalam laporan keuangan hal ini dikarenakan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkembang sehingga laporan keuangan dapat dikerjakan dengan mudah. Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam sistem informasi akuntansi yaitu kecepatan dalam pemrosesan, keakuratan perhitungan, penyiapan laporan keuangan, penyiapan data dalam jumlah besar, dan kemampuan multiprocessing. Penelitian ini menolak penelitian

Setia (2018) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes karena pada lembaga pengkreditan desa dan koperasi yang ada masih berjalan walaupun ada beberapa permasalahan akan tetapi dapat di atasi dengan baik. Penentuan variabel di dasarkan pada observasi awal yang saya lakukan dimana menemukan kendala pada kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hal ini dikatakan langsung oleh pengurus BUMDes yang mana hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dihasilkan. Dan tempat penelitian dilakukan pada BUMDes Kecamatan Gerokgak karena pada observasi awal terdapat beberapa BUMDes yang mengalami permasalahan di laporan keuangannya. Berikut ini beberapa permasalahan yang pada BUMDes Kecamatan Gerokgak.

BUMDes Amartha Desa Patas terjadi permasalahan dimana modal yang awalnya sebesar Rp 1 M saat ini hanya tersisa Rp 21 Juta. Anwar (2019) menyatakan bahwa permasalahan BUMDes Amartha ini dilakukan oleh pengurusnya sendiri, yang mana beberapa pengurus BUMDes menilep dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Hal ini terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar masyarakat Desa Patas di GOR Amartha Yudha. Sakitnya BUMDes Desa Patas terindikasi dengan adanya laporan keuangan yang tersisa hanya Rp 21 Juta dari modal awal sebesar Rp 1 M. Sejak awal berdiri BUMDes Amartha hanya sekali memberikan laporan pertanggung jawaban, yakni bulan juli tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban ditolak oleh warga karena dianggap mengada-ada dengan mencantumkan keuntungan sebesar

Rp 30 Juta. Banyak kejanggalan lainnya yang ditemukan sehingga permasalahan ini sudah direkomendasikan kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika, hal ini tidak ditindak lanjuti maka akan berdampak banyak hal salah satunya kerugian yang dialami warga, desa dan negara. Karena dana BUMDes berasal dari hibah pemerintah Provinsi Bali melalui Program Gerbang Sadu Mandara, LPMD dan pemerintah desa (<https://balitribune.co.id>). Artikel diatas sejalan dengan pernyataan Made Yasa selaku Sekretaris Desa Patas menyatakan bahwa, BUMDes Amartha Patas memang mengalami masalah pada laporan keungan dimana laporan pertanggungjawaban tahun 2019 ditolak karena tidak adanya anggaran masuk dan laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataannya dimana pada laporan neraca di cantumkan bahwa BUMDes mendapatkan keuntungan. Perkiraan saya agar BUMDes ini maju semua anggarannya dikarang padahal tidak ada pemasukan kemudian agar anggarannya tetap maka diberikan pernyataan minjam maka akan ada data pinjaman akan tetapi pinjaman fiktif.

Permasalahan tidak hanya terjadi pada BUMDes Amartha saja akan tetapi ada beberapa BUMDes juga mengalami permasalahan. Seperti halnya BUMDes Jagatditha Desa Pengulon yang mana menurut Putu Darmada selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa, terdapat kejanggalan pada laporan keuangannya dimana terlihat dari laporan neraca yang mengalami kerugian. Kerugian ini terjadi karena belum adanya pembayaran pinjaman pada BUMDes. Akan tetapi setelah di telusuri secara langsung dengan menemui nasabah di temukannya bukti bahwa nasabah sudah melakukan pembayaran tetapi tidak ada dalam pencatatan sehingga terlihat adanya kejanggalan pada laporan keuangan yang mana data yang tidak

sinkron antara data nasabah dengan pencatatan. Selain itu BUMDes Cipta Werdhi Amerta Desa Tinga Tinga juga mengalami masalah dimana menurut Made Heryasa selaku Sekretaris Desa Tinga Tinga mengatakan bahwa, BUMDes Cipta Werdhi Amerta Desa Tinga Tinga, terdapat adanya permasalahan ketidaksesuaian laporan hal ini terlihat dari musyawarah desa yang mana laporan neraca pada kas dan data nasabah yang tidak sesuai. Disebutkan uang yang beredar di masyarakat atau peminjam perseorangan sejumlah nominal yang ditentukan akan tetapi pada saat dimintak data kolektivitas nasabah berupa nama nasabah dan nominal pinjaman ternyata datanya tidak sesuai dengan laporan neraca. Permasalahan laporan keuangan juga terjadi pada BUMDes Santhi Karya Jaya Menurut Nyoman Sudiarta selaku perbekel Desa Penyabangan mengatakan bahwa, ada permasalahan pada BUMDes Santhi Karya Jaya dimana laporan neraca tidak mendapatkan laba tetapi rugi. Hal ini disebabkan karena simpan pinjam yang tidak jalan. Dengan adanya permasalahan ini maka di bentuk tim pencari data yang mana bergerak menggunakan data yang di berikan oleh pengurus BUMDes. Tim pencari data mendapatkan hasil dimana simpan pinjam yang tidak jalan ini disebabkan karena belum ada pengembalian, akan tetapi pada saat dilakukannya musyawarah desa ditemukannya bukti bahwa ada beberapa nasabah yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi belum ada dalam pencatatan, hal ini terjadi karena pembayaran secara langsung atau pribadi sehingga lupa dicatat pada buku pencatatan.

Berdasarkan uraian diatas, adanya masalah pada laporan keuangan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia, pengawasan yang belum memadai dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang belum optimal sehingga penulis

tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kualitas SDM, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada BUMDes Se-Kecamatan Gerokgak)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Terjadinya permasalahan laporan keuangan pada BUMDes Kecamatan Gerokgak.
2. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai masalah salah satunya lambatnya pertumbuhan BUMDes.
3. Banyak kecurangan yang terjadi di dalam laporan keuangan BUMDes karena kurangnya pengawasan yang baik dan memadai.
4. Pegawai BUMDes dalam pengimputan data menggunakan sistem informasi akuntansi masih sederhana sehingga perlu diadakannya pelatihan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diinginkan maka dari itu penelitian ini akan berfokus kepada kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak?
2. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak?
3. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak.
2. Pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak.
3. Sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak.
4. Kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kecamatan Gerokgak.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya yang akan mengambil penelitian sejenis seperti pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga dan menambah sumber bacaan ilmiah serta dapat digunakan mahasiswa lain untuk menjadi pembanding penelitian.

